

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor usaha di masa ini terus berkembang dengan cepat serta berperan aktif dalam membangkitkan sektor perekonomian di Indonesia. Sektor usaha yang menunjukkan eksistensinya dengan terus berkembang di berbagai bidang ialah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM ialah jenis usaha ekonomi produktif yang terus tumbuh serta menyumbang perekonomian terbesar bagi Indonesia. Berkembangnya UMKM ini tentu memberikan harapan besar bagi perekonomian negara dengan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat luas dan mengurangi masalah pengangguran. Tentunya kemakmuran dan kesejahteraan sosial dapat segera terwujud.

Perkembangan UMKM di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah UMKM tahun 2021 mencapai 64,2 juta, jumlah ini berkontribusi terhadap PDB sebesar 61,07%. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa UMKM dapat menyerap tenaga kerja sekitar 97% serta menghimpun investasi hingga 60,42% (Kemenkeu, 2021). Seiring dengan terus berkembangnya UMKM ini tentu akan semakin banyak kebutuhan untuk mampu mengembangkan dan mempertahankan usahanya. Pemerintah berupaya untuk terus mendorong pelaku UMKM agar mampu bertahan, berkembang serta tumbuh khususnya di era pandemi seperti saat ini. Berbagai cara dilakukan pemerintah dalam menangani hal ini dengan

cara memberikan subsidi bunga, menempatkan dana pemerintah pada bank untuk dapat memperluas kredit modal kerja serta penjaminan kredit modal kerja, hingga intensif pajak bagi UMKM (Kemenkeu, 2021). Upaya lain agar UMKM mampu berkembang dan bertahan yaitu dengan memiliki pendanaan yang cukup serta akses perkreditan. Pendanaan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pinjaman ke lembaga keuangan atau lembaga perkreditan yang ada.

Namun, dalam hal menyakinkan kreditor bahwa para pelaku UMKM ini layak untuk menerima pinjaman tersebut adalah salah satu tantangan terbesar yang harus para pelaku UMKM hadapi (Silvia & Azmi, 2019). Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan bahwa ada 3 masalah utama yang menghambat UMKM salah satunya masalah pendanaan (Amani, 2021). Terlebih lagi belum banyak UMKM yang mengetahui pentingnya pembukuan akuntansi secara rutin serta terstruktur dan hanya sebagian saja yang telah membuat laporan keuangan sesuai standar akuntansi (Dinkop Jateng, 2021). UMKM yang telah menyusun laporan keuangan dengan baik akan membantu serta mempermudah dalam menyakinkan kreditor dan mendapatkan sumber pendanaan. Kreditor yakin bahwa mereka memiliki potensi untuk berkembang dan dapat membayar pinjaman tepat waktu. Manfaat dalam menyusun laporan keuangan lainnya yaitu mampu memberikan penjelasan terkait dengan keadaan serta kinerja keuangan perusahaannya, dengan begitu dapat mengevaluasi hal-hal yang perlu ataupun harus diperbaiki.

Salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terus mengalami peningkatan jumlah UMKM serta berkembang sangat signifikan setiap tahunnya adalah Kabupaten Sleman. Menurut data Dinas Koperasi dan UKM Sleman jumlah UMKM untuk saat ini adalah 90.266 unit yang terdiri atas 89.579 usaha mikro, 663 usaha kecil, dan 24 usaha menengah (Dinkop Kabupaten Sleman, 2022). Sesuai fakta tersebut dapat dilihat bahwa Kabupaten Sleman memiliki peluang besar dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian di Indonesia. Akan tetapi, terus meningkatnya UMKM tidak diimbangi dengan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sleman, Fahmi Khoiri menyatakan pencatatan laporan keuangan ini berkaitan dengan akses permodalan. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman sudah seringkali melakukan pelatihan pencatatan pelaporan keuangan. Namun, persoalan ini masih saja diabaikan pelaku usaha (Wira, 2021). Para pelaku UMKM umumnya telah menyusun laporan keuangan secara sederhana dan konvensional tanpa memisahkan dana yang digunakan untuk usahanya dengan kehidupan sehari-hari.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) berupaya membantu pelaku usaha sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang baik hingga akhirnya IAI mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM). Adapun maksud dikeluarkannya standar akuntansi ini supaya laporan keuangan lebih transparan, efisien, serta

akuntabel bagi pihak internal maupun eksternal. Standar akuntansi ini dibuat agar pelaku usaha mampu memenuhi kebutuhan akuntansinya dan digunakan oleh pelaku usaha yang belum mencukupi syarat akuntansi dalam SAK ETAP (IAI, 2016). Diharapkan adanya standar akuntansi ini kedepannya dapat membantu UMKM untuk dapat mengakses pendanaan dengan mudah, sehingga tidak ada lagi UMKM yang terhambat dalam proses pendanaan ini yang disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan standar akuntansi. Selain untuk mengakses pendanaan menyusun laporan keuangan ini juga bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja perusahaan.

Penelitian Kusuma & Lutfiany (2018) menyatakan tingkat pendidikan pemilik baik parsial dan simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terkait penerapan SAK EMKM. Sementara itu, penelitian Yuniarto (2019) menyatakan pendidikan pemilik tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAK EMKM. Akan tetapi, hasil penelitian Silvia & Azmi (2019) menyatakan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap persepsi pengusaha akan pentingnya menyusun laporan keuangan secara teratur berbasis SAK EMKM.

Berdasarkan penelitian Kusuma & Lutfiany (2018) pemahaman akuntansi secara parsial berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Parhusip & Herawati (2020) dimana pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM. Akan tetapi, penelitian ini tidak sejalan dengan

penelitian Novalda (2021) menyatakan pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap penerapan pencatatan keuangan berbasis SAK EMKM.

Hasil penelitian Cahyaningrum & Andhaniwati (2021) menyatakan umur usaha berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM. Akan tetapi, penelitian Nurhidayanti (2019) menyatakan umur usaha tidak berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM. Sementara itu, hasil penelitian Silvia & Azmi (2019) menyatakan lama usaha tidak berpengaruh terhadap persepsi pengusaha UMKM tentang pentingnya laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Hasil penelitian Sholeh et al. (2020) menyatakan lama usaha tidak berpengaruh positif terhadap pemahaman UMKM dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

Hasil penelitian Trisomantagani et al. (2017) menyatakan persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan UMKM dalam menerapkan SAK EMKM. Hasil penelitian Nurhidayanti (2019) menyatakan persepsi kemudahan berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM. Sementara itu, penelitian Susilowati et al. (2021) menyatakan persepsi pelaku UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SAK EMKM. Akan tetapi, penelitian Parhusip & Herawati (2020) menyatakan persepsi pelaku UMKM tidak berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM.

Berdasarkan penelitian Adino (2019) menyatakan sosialisasi SAK EMKM berpengaruh signifikan terhadap pemahaman SAK EMKM. Hasil

penelitian Yuniarto (2019) menyatakan sosialisasi SAK EMKM berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAK EMKM. Sementara itu, hasil penelitian Darmasari & Wahyuni (2020) menyatakan sosialisasi berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM. Akan tetapi, penelitian Parhusip & Herawati (2020) menyatakan sosialisasi SAK EMKM tidak berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM.

Adanya permasalahan terkait UMKM yang belum menyusun laporan sesuai SAK EMKM serta hasil yang tidak konsisten ini menyebabkan peneliti berminat meneliti lebih dalam terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap SAK EMKM. Maka, judul penelitian yang peneliti pilih yaitu “PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PEMAHAMAN AKUNTANSI, LAMA USAHA, PERSEPSI KEMUDAHAN, DAN SOSIALISASI SAK EMKM TERHADAP SAK EMKM PADA UMKM DI KABUPATEN SLEMAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penyusunan latar belakang diatas, mampu disusun rumusan masalah:

Terkait dengan pengaruh tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, lama usaha, persepsi kemudahan, dan sosialisasi SAK EMKM terhadap SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Sleman baik secara individu maupun secara bersamaan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, dapat disusun pertanyaan penelitian yaitu:

- 1.3.1 Apakah tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Sleman?
- 1.3.2 Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Sleman?
- 1.3.3 Apakah lama usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Sleman?
- 1.3.4 Apakah persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Sleman?
- 1.3.5 Apakah sosialisasi SAK EMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Sleman?
- 1.3.6 Apakah tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, lama usaha, persepsi kemudahan dan sosialisasi SAK EMKM secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Sleman?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pertanyaan penelitian diatas, mampu disusun tujuan penelitian untuk:

- 1.4.1 Membuktikan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Sleman.
- 1.4.2 Membuktikan pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Sleman.
- 1.4.3 Membuktikan lama usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Sleman.
- 1.4.4 Membuktikan persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Sleman.
- 1.4.5 Membuktikan sosialisasi SAK EMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Sleman.
- 1.4.6 Membuktikan tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, lama usaha, persepsi kemudahan dan sosialisasi SAK EMKM secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Sleman.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat teoritis

1. Diharapkan adanya penelitian ini mampu memperluas wawasan dan pemahaman bagi pembaca terkait dengan faktor yang berpengaruh terhadap SAK EMKM.
2. Diharapkan penelitian ini mampu menjadi sumber referensi serta bacaan bagi peneliti selanjutnya.

1.5.2 Manfaat praktis

1. Diharapkan mampu menjadi referensi bagi pelaku usaha untuk dapat menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM.
2. Diharapkan adanya penelitian ini mampu menjadi masukan bagi pemerintah agar dapat membantu mendorong pelaku usaha menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM.

1.6 Batasan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian diatas, dapat disusun batasan penelitian sebagai berikut:

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, lama usaha, persepsi kemudahan, dan sosialisasi SAK EMKM terhadap SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Sleman.